

# LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2022



**DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG**

**Jln. Mayor Abdurahman No. 200 Telp. (0261) 201 463  
SUMEDANG – 45322**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah selesai kami susun. Penyusunan LAKIP Tahun 2022 merupakan bagian dari pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang selama kurun waktu satu tahun. Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang didalamnya meliputi Visi dan Misi Dinas, arah kebijakan umum dan strategi kegiatan, serta program pembangunan yang dilaksanakan di SKPD Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan LAKIP tahun 2022 tidak terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan Daerah, kondisi lingkungan eksternal, serta evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, sehingga diharapkan implementasi program pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat lebih berdaya guna, terutama dalam mengatasi kemiskinan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua.

Sumedang, Desember 2022

Penyusun,

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Triwulan I Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.
- 7) Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tugas**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial.

### **1.3.2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial, Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang**

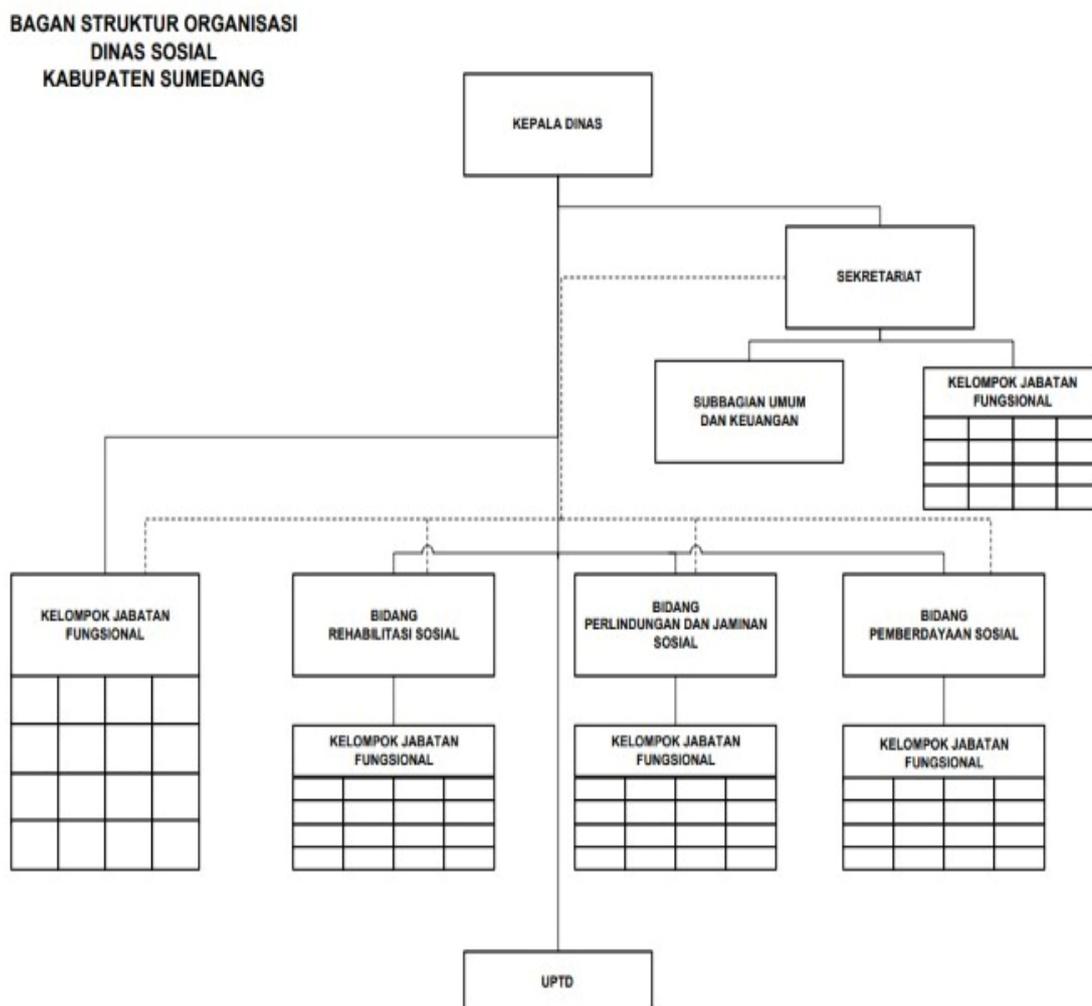
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - a. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
    - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
    - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
    - d. UPTD; dan
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang



#### 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Sosial yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang periode 2019-2023.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1  
Identifikasi Permasalahan Urusan Sosial

No	Urusan	Permasalahan
1.	<b>SOSIAL</b>	Belum adanya payung hukum atau aturan Pemerintah Daerah mengenai Penanganan Kesejahteraan Sosial
		Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum Update
		Penerima Manfaat bantuan sosial masih ada yang diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
		Penerima Manfaat Bantuan Sosial masih ada yang belum tepat sasaran
		Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Tingkat Desa belum berjalan secara optimal sebagai pendukung Sistem Layanan Rujukan Terpadu di tingkat Kabupaten
		Sarana dan Prasarana di Shelter / Rumah Singgah masih belum memenuhi standar
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang

No	Urusan	Permasalahan
		kesiap siagaan bencana alam
		Pemenuhan buffer stock bagi korban bencana masih rendah / belum optimal
		Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih belum Optimal
		Masih kurangnya pelestarian akan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

### 1.5 Uraian Singkat Organisasi

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang harus berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Perwujudan Misi ini oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten Sumedang memiliki manfaat antara lain untuk:

1. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.

Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

##### **2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah Misi ke-1 yaitu **Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat**. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

<b>Visi :</b> <b>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</b>				
<b>Misi yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

<b>Visi :</b> <b>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</b>				
<b>Misi yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  SAKIP Perangkat Daerah

### 2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial;
4. Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana
5. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
6. Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah.

### 2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun

2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menyusun Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;	Penerbitan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2.	Peningkatan Layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara Optimal;
3.	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mitra Sosial;	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;
4.	Peningkatan Penanganan bagi Korban Bencana	Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5.	Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
6.	Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah.	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

### 2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		SAKIP Perangkat Daerah	

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	65	Persen	Program Pemberdayaan Sosial	650.343.200	APBD
					Program Rehabilitasi Sosial	2.266.715.940	APBD
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.967.475.500	APBD
					Program Penanganan Bencana	842.000.000	APBD
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	68.664.600	APBD
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29,04	Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.802.048.209	APBD
		SAKIP Perangkat Daerah	A	Kategori			

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

#### **3.1. Capaian Kinerja**

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	65
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	29,04
	SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A

*Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2022.*

### 3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	65	86,33	132,81	Sangat Tinggi
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	29.08	-	-	-
	SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A	-	-	-
Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja		Persen			44,27	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja untuk urusan sosial sebagaimana tersirat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pencapaian yang terealisasi pada tahun ke-4 perencanaan (tahun 2022) untuk indikator ini, telah terealisasi sebesar 86,33% dari target yang dicanangkan sebesar 65% sehingga capaian kerjanya sebesar 132,81%. Dalam artian pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai target kinerja 65% dari jumlah PPKS yaitu sebesar 50.219 orang dan jumlah PPKS yang mendapat bantuan yaitu sebesar 66,698 orang maka diperoleh realisasi 86,33% dengan capaian kinerja sebesar 132,81%. Berikut di sajikan Target dan realisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Target dan Realisasi PPKS tahun 2022

NO	VARIABEL DATA	SATUAN	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	%
	<b>Jumlah PPKS</b>	<b>orang</b>	<b>77,260</b>	<b>66,698</b>	<b>86.33</b>
1	Anak Bayi terlantar	orang	1	1	100
2	Anak terlantar	orang	317	317	100
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	orang	16	16	100
4	Anak jalanan	orang	-	-	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	orang	70	70	100
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	orang	1	1	100
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	orang	19	19	100
8	Lanjut usia terlantar	orang	736	736	100
9	Penyandang disabilitas	orang	782	782	100
10	Tuna susila	orang	20	17	85

NO	VARIABEL DATA	SATUAN	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	%
	<b>Jumlah PPKS</b>	<b>orang</b>	<b>77,260</b>	<b>66,698</b>	<b>86.33</b>
11	Gelandangan	orang	5	5	100
12	Pengemis	orang	3	3	100
13	Pemulung	orang	-	-	-
14	Kelompok minoritas	Kelompok	26	-	-
15	Bekas warga binaan lembaga pemsayarakatan	orang	34	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODH)	Orang	49	31	63.27
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	orang	1	1	100
18	Korban trafficking	orang	1	1	100
19	Korban tindak kekerasan	orang	52	52	100
20	Pekerja migran bermasalah 19ocial (PMBS)	orang	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	Orang	5,283	5,283	100
22	Korban Bencana Sosial	Orang	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	8,211	300	3.65
24	Fakir miskin	orang	58,863	58,863	100
25	Keluarga bermasalah 19ocial psikologis	Orang	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok	2,770	200	7.22

Sumber : Data diolah Tahun 2022

2. Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah memiliki indikator sasaran sebagai berikut:

a. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pada indikator sasaran ini memiliki target kinerja pada tahun 2022 sebesar 29,04% dan belum dilakukan penilaian kinerja.

b. SAKIP Perangkat Daerah

Pada indikator sasaran ini memiliki target kinerja pada tahun 2022 dengan kategori A dan belum dilakukan penilaian kinerja.

### **3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 132,81%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 89,17%. Terjadi kenaikan kinerja sebesar 43,64%. Target tersebut dapat tercapai walaupun indikator sasaran lainnya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan SAKIP Perangkat Daerah belum dilakukan penilaian.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Tahun 2022							Tahun 2021						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	65	86,33	132,81	Sangat Tinggi	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	7,65	7,91	89,17	Tinggi
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	29,04	-	-	-		Nilai Sakip Daerah	Skor	A	A	100	Sangat Tinggi
	SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A	-	-	-		Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	95	97	102,10	Sangat Tinggi
								Jumlah Inovasi	Inovasi	3	3	100	Sangat Tinggi
								Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Persen	75	80,11	106,81	Sangat Tinggi
<b>Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>Persen</b>			<b>44,27</b>	<b>Sangat Rendah</b>		<b>Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja</b>	<b>Persen</b>			<b>44,27</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

### 3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2022 sebesar Rp. 15.597.242.449 yang terdiri dari 5 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 14.367.658.773 atau 92,12%.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja**  
**Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.802.048.209	6.308.677.606	92.75
2	Program Pemberdayaan Sosial	650.343.200	631.052.452	97.03
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.266.715.940	2.257.339.150	99.59
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.967.475.500	4.266.490.500	85.89
5	Program Penanganan Bencana	842.000.000	835.434.465	99.22
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	68.664.600	68.664.600	100

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pendukung Pencapaian Sasaran Kinerja IKU**  
**Dinas Sosial kabupaten Sumedang Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	132,81	92,12	-40,69	Efisien
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	92,75	-	-
	SAKIP Perangkat Daerah				

### 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Permasalahan dan Solusi**

No	Unit Kerja	Bidang	Permasalahan	Solusi
1	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Keterbatasan kapasitas ASN di Bidang Linjamsos sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;	Usulan Penambahan Personil ASN di bidang Linjamsos
			Adanya penambahan rincian kegiatan diperubahan sehingga waktu pelaksanaan tidak maksimal;	Koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah/institusi terkait lebih maksimal
			Adanya perubahan kebijakan terkait tenaga pendamping program sembako sehingga tanggung jawab pendampingan di lapangan menjadi tidak jelas;	TKSK masih didayagunakan untuk mendampingi program sosial pangan agar pendampingan program tidak stagnan
			Masih rendahnya pemahaman masyarakat yang dikategorikan miskin/tidak mampu terhadap pentingnya kesesuaian adminduk sehingga menghambat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar PPKS;	Sosialisasi dan edukasi kepada kepala desa/Lurah dan operator SIKS-NG Desa/Kelurahan
			Dalam penyaluran buffer stock untuk penanganan bencana alam Pengiriman logistik tidak bisa menggunakan kendaraan roda 4	Pengiriman logistik di kirim memakai roda 2 atau jalan kaki
				Jumlah Paket Logistik Kebencanaan APBD sangat terbatas
			Personil TAGANA Kab. Sumedang relative Sedikit	Penerimaan Anggota Baru Sejumlah 18 Anggota
				Sarana dan Prasarana Pendukung Kedaruratan Bencana Terbatas
		Bidang Rehabilitasi Sosial	Banyak Data CPCL kurang akurat. dan Calon Penerima Bantuan ada sebagian kurang tepat Sasaran. dan Penerbitan nomor Keppub sering terlambat atau telat keluarnya.	Harus adanya kegiatan Verifikasi. dan Validasi Data serta Data harus update. Serta Harus terus Komunikasi dan Konsultasi
				Surat Permohonan Bantuan dari Desa atau Kelurahan Data Calon Penerima identitasnya kurang lengkap dan Kebutuhannya tidak disampaikan atau tidak diberitahukan.

No	Unit Kerja	Bidang	Permasalahan	Solusi
			Dalam melaporkan laporan Pertanggungjawaban masih banyak yang kurang lengkap terutama dalam Dokumentasi dan Nota/Kwitansi Pembelian Sembako	Harus adanya kegiatan Bimbingan teknis Bansos Uang Permakanan
			Sulitnya mendapatkan Data BNBA karena kurang koordinasi di Tingkat Desa/TKSK dan data kurang UP Date	Meningkatkan koordinasi sampai ke tingkat bawah. Update data dengan Desa melalui verfal data
			Kekurangan Sumber Daya Manusia Peksos dalam Penanggulangan ABH	Usulan SDM Peksos
		Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	Kualitas SDM Pemproses Kajian Akademis Perda tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal	Dilakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI serta OPD terkait lainnya
			Output dan outcome hasil bimbingan Teknis Pengurus SLRT Rumah Besar Simpati dan Puskesmas belum optimal, kinerja fasilitator Puskesmas belum meningkat secara signifikan	Dilakukan kunjungan, monitoring dan evaluasi ke Desa/Kelurahan untuk menganalisis kendala penanganan PPKS di Puskesmas Desa/Kelurahan
			Kinerja Back Office belum optimal	Diberikan Job Description yang jelas
			Honor fasilitator baru teralokasikan 3 kali dalam setahun	Dialokasikan Honor Fasilitator 7 kali ditahun 2023
			Honor Supervisor baru taralokasikan 4 kali dalam setahun	Dialokasikan Honor Supervisor
			Dalam rangka Studi Banding Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Hasil Studi Banding belum bisa diterapkan secara optimal	Hasil Studi Banding dikaji dan disesuaikan dengan kondisi local Content di Kabupaten Sumedang
			Dalam Rangka Monitoring Pelayanan SLRT/Puskesmas Hasil monitoring belum bisa dikaji secara mendalam	Diagendakan Rakor dalam Pembinaan SDM SLRT/Puskesmas
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman makam Nasional Kabupaten/Kota belum Optimal	Tahun 2023 diupayakan untuk alokasi Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Nasional Kabupaten/Kota
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota belum optimal	Tahun 2023 diupayakan untuk alokasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

### 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 89,23%, dengan rincian sebagai berikut :



Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Keluaran (Output)	Target			Realisasi		Prosentase		PD
			Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja	
		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai								
		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai								
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai								
<b>1 06 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>43</b>	<b>Dokumen</b>	<b>158,507,080</b>	<b>43</b>	<b>154,757,040</b>	<b>393</b>	<b>100</b>	
<b>1 06 01 2.01 01</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	34,182,080	7	33,082,080	96.78	100	
<b>1 06 01 2.01 02</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	Dokumen	16,382,000	2	16,281,960	99.39	100	
<b>1 06 01 2.01 04</b>	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	2	Dokumen	19,225,000	2	19,125,000	99.48	100	
<b>1 06 01 2.01 06</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	32	Dokumen	88,718,000	32	86,268,000	97.24	100.00	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase		PD	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
<b>1 06 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>4,719,570,249</b>	<b>100</b>	<b>4,239,629,329</b>	<b>89.83</b>	<b>100</b>	
<b>1 06 01 2.02 01</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	4,684,570,249	12	4,204,629,329	89.75	100.00	
<b>1 06 01 2.02 07</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19	Dokumen	35,000,000	19	35,000,000	100	100.00	
<b>1 06 01 2.02 07</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>73,930,000</b>	<b>100</b>	<b>73,930,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut yang disediakan	70	Pes	25,930,000	70	25,930,000	100	100.00	
1 06 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	30,000,000	6	30,000,000	100	100.00	
1 06 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Kali	18,000,000	12	18,000,000	100	100.00	
<b>1 06 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>399,119,920</b>	<b>100</b>	<b>398,901,520</b>	<b>99.95</b>	<b>100</b>	
1 06 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1	Dokumen	87,960,000	1	87,744,000	99.75	100	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase		PD	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja		
		n Berbasis Elektronik pada SKPD								
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	50,008,420	12	50,008,420	100	100	
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Laporan	80,000,000	12	80,000,000	100	100.	00
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	Laporan	14,907,100	12	14,907,100	100	100	
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12	Laporan	9,960,000	12	9,960,000	100	100.	00
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128	Laporan	156,284,400	128	156,282,000	100	100.	00
<b>1 06 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>280,347,960</b>	<b>100</b>	<b>280,285,396</b>	<b>99.98</b>	<b>100</b>	
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	32,430,000	1	32,430,000	100	100.	00
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13	Unit	197,875,960	13	197,813,396	99.97	100.	00
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	50,042,000	1	50,042,000	100	100.	00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Keluaran (Output)	Target			Realisasi		Prosentase		PD
			Kinerja		Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja	
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	464,840,000	100	456,789,421	98.27	100	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang disediakan	12	Laporan	43,200,000	12	35,149,421	81.36	100.00	
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	Laporan	13,640,000	2	13,640,000	100.00	100	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	408,000,000	12	408,000,000	100.00	100.00	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	705,733,000	92.31	704,384,900	99.81	92	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	Laporan	297,843,000	12	297,728,900	99.96	100.00	
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Unit	407,890,000	1	406,656,000	99.70	100	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	3.61	Persen	650,343,200	-	631,052,452	97.03	100	
		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggara	58.33			58.33				

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase		PD	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja		
		raan kesejahteraan sosial								
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dikembangkan	7	Jenis	650,343,200	7	631,052,452	97.03	100.00	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dibina	95	Lembaga	650,343,200	93	631,052,452	97.03	97.89	
1 06 04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan PPKS lainnya diluar ODHA, HIV dan Korban Napza) yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar</b>	<b>33,08</b>	<b>Persen</b>	<b>2,266,715,940</b>	<b>24,47</b>	<b>2,257,339,150</b>	<b>99.59</b>	<b>73,97</b>	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	14,805	Orang	1,949,127,820	7.185	1,943,771,030	99.73	48,53	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	14805	Orang	1,587,603,120	6.549	1,587,333,110	99.98	44,24	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase		PD	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja		
		Pengemis yang menerima bantuan Permakanan								
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase Penerima Bantuan Sosial Sandang	100	Persen	63,191,750	148	62,902,950	99.54	148	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu	150	Orang	200,000,000	333	196,229,020	98.11	222	
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelyanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga	100	Persen	98,332,950	-	97,305,950	98.96	100	
			155	Orang		155				
<b>1 06 04 2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	<b>33.08</b>	<b>Persen</b>	<b>317,588,120</b>	<b>5.61</b>	<b>313,568,120</b>	<b>98.73</b>	<b>16.97</b>	
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100	Persen	267,588,120	2,119	263,568,120	98.50	100	
						100				
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial (Tuna Susila, ABH, dan Eks Warga Binaan)	20	Orang	50,000,000	20	50,000,000	100	100	
<b>1 06 05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Fakir Miskin (DTKS) yang menerima Jaminan Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar</b>	<b>98</b>	<b>Persen</b>	<b>4,967,475,500</b>	<b>100.00</b>	<b>4,266,490,500</b>	<b>85.89</b>	<b>102.0</b>	
1 06 05 2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4,967,475,500</b>	<b>5</b>	<b>4,266,490,500</b>	<b>85.89</b>	<b>100</b>	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase		PD	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja		
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dokumen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Dokumen	193,218,000	1	180,188,000	93.26	100	
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	57,195	KPM PKH	4,165,493,300	57,195	3,482,938,300	83.61	100	
			1,870	DBHC HT/Orang		1,865			99.73	
			4,302	Orang/BLT BBM		2,844			66.11	
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah DTKS Penerima Bantuan	330	Orang	608,764,200	370	603,364,200	99.11	112.12	
<b>1 06 06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>842,000,000</b>	<b>100</b>	<b>835,434,465</b>	<b>99.22</b>	<b>100</b>	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapat Perlindungan Sosial	100	Persen	432,000,000	100	430,607,421	99.68	100	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial Permakanan	100	Persen	432,000,000	100	430,607,421	99.68	100	
			3,118	KK		3,118				
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	410,000,000	2	404,827,044	98.74	100	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Keserasian Sosial	5	Desa	75,000,000	5	70,990,000	94.65	100	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		Prosentase		PD	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja		
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (tagana)	55	Orang	335,000,000	55	333,837,044	99.65	100	
1 06 07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Makam Pahlawan dan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>68,664,600</b>	<b>100</b>	<b>68,664,600</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	
1 06 07 2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Makam Pahlawan Nasional dan Daerah yang dipelihara</b>	<b>3</b>	<b>Lokasi</b>	<b>68,664,600</b>	<b>3</b>	<b>68,664,600</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	3	Lokasi	49,464,600	3	49,464,600	100	100	
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Petugas Keamanan Taman Makam Pahlawan	3	Orang	19,200,000	3	19,200,000	100	100	
			<b>84,810</b>		<b>15,597,247,449</b>	<b>79,09</b>	<b>14,367,658,773</b>	<b>92.12</b>	<b>89,23</b>	

Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Sosial berdasarkan capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun anggaran 2022 yang diimplementasikan melalui 6 Program, 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 15,597,247,449,- dan terealisasi sebesar Rp. 14,367,658,773,- (92,12%) dengan penjelasan rincian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki target anggaran Rp. 34.182.080,- dengan realisasi anggaran Rp. 33.082.080,- (96,78%) dan target kinerja sebesar 7 Dokumen dengan realisasi 7 dokumen (100%).
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD memiliki target anggaran Rp. 16.382.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 16.281.960,- (99,39%) dan target kinerja sebesar 2 Dokumen dengan realisasi 2 dokumen (100%).
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD memiliki target anggaran Rp. 19.225.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.125.000,- (99,48%) dan target kinerja sebesar 2 Dokumen dengan realisasi 2 dokumen (100%).

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja memiliki target anggaran Rp. 88.718.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 86.268.000,- (97,24%) dan target kinerja sebesar 32 Dokumen dengan realisasi 32 dokumen (100%).
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki target anggaran Rp. 4.684.570.249,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.204.629.329,- (89,75%) dan target kinerja sebesar 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan (100%).
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD memiliki target anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 35.000.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 19 Dokumen dengan realisasi 19 dokumen (100%).
7. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya memiliki target anggaran Rp. 25.930.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 25.930.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 70 Pcs dengan realisasi 70 Pcs (100%).
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian memiliki target anggaran Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.000.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 6 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen (100%).
9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan memiliki target anggaran Rp. 18.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.000.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Kali dengan realisasi 12 kali (100%).
10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD memiliki target anggaran Rp. 87.960.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 87.744.000,- (99,75%) dan target kinerja sebesar 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen (100%).
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki target anggaran Rp. 50.008.420,- dengan realisasi anggaran Rp. 50.008.420,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki target anggaran Rp. 80.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 80.000.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki target anggaran Rp. 14.907.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 14.907.100,- (100%) dan target kinerja sebesar 6 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen (100%).

14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki target anggaran Rp. 9.960.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.960.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki target anggaran Rp. 156.284.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 156.282.000,- (99,99%) dan target kinerja sebesar 128 Laporan dengan realisasi 128 Laporan (100%).
16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki target anggaran Rp. 32.430.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 32.430.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 1 unit dengan realisasi 1 unit (100%).
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki target anggaran Rp.197.875.960,- dengan realisasi anggaran Rp. 197.813.396,- (99,97%) dan target kinerja sebesar 13 Unit dengan realisasi 13 Unit (100%).
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki target anggaran Rp. 50.042.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 50.042.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 1 Unit dengan realisasi 1 Unit (100%).
19. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik memiliki target anggaran Rp. 43.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 35.149.421,- (81,36%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor memiliki target anggaran Rp. 13.640.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.640.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan (100%).
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki target anggaran Rp. 408.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 408.000.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan memiliki target anggaran Rp. 297.843.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 297.728.900,- (99,96%) dan target kinerja sebesar 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan (100%).
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki target anggaran Rp. 407.890.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 406.656.000,- (99,70%) dan target kinerja sebesar 1 Unit dengan realisasi 1 Unit (100%).
24. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki target anggaran Rp.

- 650.343.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 631.052.452,- (97,03%) dan target kinerja sebesar 95 Lembaga dengan realisasi 93 Lembaga (97,89%).
25. Penyediaan Permakanan memiliki target anggaran Rp. 1.587.603.120,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.587.333.110,- (99,98%) dan target kinerja sebesar 14.805 Orang dengan realisasi 9.324 Orang (73,97%).
  26. Penyediaan Sandang memiliki target anggaran Rp. 63.191.750,- dengan realisasi anggaran Rp. 62.902.950,- (99,54%) dan target kinerja sebesar 100 Persen dengan realisasi 100 Persen (100%).
  27. Penyediaan Alat Bantu memiliki target anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 196.229.020,- (98,11%) dan target kinerja sebesar 150 Orang dengan realisasi 333 Orang (222%).
  28. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga memiliki target anggaran Rp. 98.332.950,- dengan realisasi anggaran Rp. 97.305.950,- (98,96%) dan target kinerja sebesar 100 Persen dengan realisasi 100 Persen (100%).
  29. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan memiliki target anggaran Rp. 267.588.120,- dengan realisasi anggaran Rp. 263.568.120,- (98,50%) dan target kinerja sebesar 100 Persen dengan realisasi 100 Persen (100%).
  30. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial memiliki target anggaran Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 50.000.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 20 Orang dengan realisasi 20 Orang (100%).
  31. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki target anggaran Rp. 193.218.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 180.188.000,- (93,26%) dan target kinerja sebesar 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen (100%).
  32. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga memiliki target anggaran Rp. 4.165.493.300,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.482.938.300,- (98,96%) dan target kinerja yaitu 57.195 KPM PKH dengan realisasi 57.195 KPM PKH (100%), 1870 Orang Penerima Bantuan DBHCHT dengan realisasi 1865 Orang (99,73%) dan 4.302 Orang Penerima Bantuan BLT BBM dengan realisasi 2.844 Orang (66,11%).
  33. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memiliki target anggaran Rp. 608.764.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 603.364.200,- (99,11%) dan target kinerja sebesar 330 Orang dengan realisasi 370 Orang (112,12%).

34. Penyediaan Makanan memiliki target anggaran Rp. 432.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 430.607.421,- (99,68%) dan target kinerja sebesar 100 Persen dengan realisasi 100 Persen (100%).
35. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana memiliki target anggaran Rp. 75.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 70.990.000,- (94,65%) dan target kinerja sebesar 5 Desa dengan realisasi 5 Desa (100%).
36. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana memiliki target anggaran Rp. 335.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 333.837.044,- (99,65%) dan target kinerja sebesar 55 Orang dengan realisasi 55 Orang (100%).
37. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota memiliki target anggaran Rp. 49.464.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 49.464.600,- (100%) dan target kinerja sebesar 3 Lokasi dengan realisasi 3 Lokasi (100%).
38. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota memiliki target anggaran Rp. 19.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.200.000,- (100%) dan target kinerja sebesar 3 Lokasi dengan realisasi 3 Lokasi (100%).

### **3.7 Dokumentasi Kegiatan**

#### **1. Program Pemberdayaan Sosial**

##### **a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah**

Kabupaten/Kota

##### **1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan**

Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Output : Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina  
95 Lembaga (100%)

Outcome : Terbinanya Kelembagaan Masyarakat 93  
Lembaga (97,03%)

Dokumentasi Foto :



## 2. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.

Output : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Permakanan (14.805 Orang)

Outcome : Terfasilitasinya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bantuan Permakanan (1.273 Orang)

Dokumentasi Foto :



## 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang.

Output : Persentase Penerima Bantuan Sosial Sandang (100%)

Outcome : Terpenuhinya Penerima Bantuan Sosial Sandang  
(100%)

Dokumentasi Foto :



### 3) Sub Kegiatan Alat Bantu.

Output : Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu (150 Orang)

Outcome : Terpenuhinya Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu (333 Orang)

Dokumentasi Foto :



## 4) Sub Kegiatan Reunifikasi.

Output : Persentase Pemberian Reunifikasi Keluarga (100%)

Outcome : Terfasilitasi nya Klien yang di Reunifikasi Keluarga (100%)

Dokumentasi Foto :



## b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

lainnya bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

## 1) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Output : Persentase Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (100%)

Outcome : Terfasilitasi nya Klien yang di Layani(100%)

Dokumentasi Fot :



2) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Output : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Tuna Susila, ABH dan Eks Warga Binaan) (20 Orang)

Outcome : Terpenuhinya bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan social bagi Tuna Susila, ABH dan Eks Warga Binaan(20 Orang)

Dokumentasi Foto :



### 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

Output : Dokumen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (1 Dokumen)

Outcome : Tersedianya Dokumen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (1 Dokumen)

Dokumentasi Foto :



## 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Output : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (57.195 KPM)

Outcome : Terfasilitasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (57.195 KPM)

Dokumentasi Foto :



3) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Output : Jumlah DTKS penerima Bantuan (330 Orang)

Outcome : Terpenuhinya Jumlah DTKS Penerima Bantuan  
(330 Orang)

Dokumentasi Foto :



**4. Program Penanganan Bencana**

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Output : Persentase Korban Bencana yang menerima  
Bantuan Sosial Permakanan (100 Persen)

Outcome : Terpenuhinya Korban Bencana yang menerima  
bantuan  
(100 Persen)

Dokumentasi Foto :



b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Siaga Bencana

Output : Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Keserasian Sosial (5 Desa)

Outcome : Kampung Siaga Bencana yang dibentuk (5 Desa)

Dokumentasi Foto :



## 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna

### Siaga Bencana

Output : Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (55 Orang)

Outcome : Jumlah Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang meningkat kapasitasnya (55 Orang)

Dokumentasi Foto :



## 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

### a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

#### 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

##### Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara (3 Lokasi)

Outcome : Makam Pahlawan yang terpelihara (3 Lokasi)

Dokumentasi Foto :



## 2) Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Petugas Keamanan Taman Makam Pahlawan (3 Lokasi)

Outcome : Makam Pahlawan yang dijaga (3 Lokasi)

Dokumentasi Foto :



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 rata-rata sebesar 44,27% (Sangat Rendah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 132,81% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum dilakukan penilaian pada tahun 2022.
- 3) Capaian kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan capaian kategori A belum tersedia nilai dikarenakan belum dilakukan penilaian.

#### **4.2 Perbaikan Kedepan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Pemberian Bantuan Sosial harus merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif terhadap stakeholder terkait sehingga dalam penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih optimal;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, Desember 2022  
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang  
Kepala



**H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720515 199803 1 010